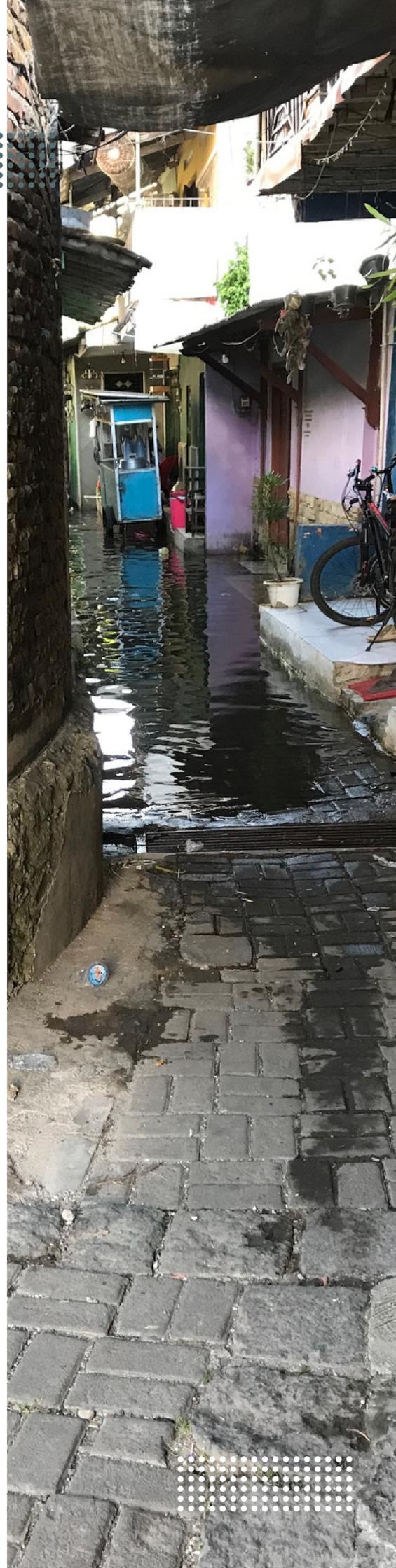




Laporan Studi Antropologi
**KONSTRUKSI SOSIAL
PADA KEMISKINAN DI
KOTA PEKALONGAN
2023**

**Riset Bersama
Bappeda Kota Pekalongan dan
Lingkar Kajian Kota Pekalongan**

Manarul Hidayat
M. Erika Rachman
M. Haidar Fikri Kurniali
M. Rayhan I'tisham
Rangga Setya Nugraha
Mutiara Kartika Dewi
Amalia Ida Gunawanti



LEMBAR PENGESAHAN

1. Kegiatan Penelitian : Riset Bersama Pemerintah Kota Pekalongan dan
Lingkar Kajian Kota Pekalongan
- Judul Penelitian : STUDI ANTROPOLOGI: KONSTRUKSI SOSIAL PADA
KEMISKINAN DI KOTA PEKALONGAN
2. Lembaga Pelaksana
Nama : Lingkar Kajian Kota Pekalongan
Alamat : Ruko Patriot 153, Jalan Patriot, Padukuhan Kraton,
Pekalongan Utara
Telp./Fax/Email : 0851 5532 2279 /lkkp.or.id
3. No. SPK : 000.9/1624/V/2023
4. Waktu Pelaksanaan : Mei - November 2023
5. Lokasi Penelitian : Kota Pekalongan
6. Peneliti :
- Ketua Tim : Manarul Hidayat
- Anggota : 1. M. Erika Rachman
2. M. Haidar Fikri Kurniali
3. M. Rayhan I'tisham
4. Rangga Setya Nugraha
5. Mutiara Kartika Dewi, ST.
6. Amalia Ida Gunawati, ST.
7. Sumber Anggaran : APBD Pemerintah Kota Pekalongan TA. 2023
8. Besar Anggaran :

Ketua Lingkar Kajian
Kota Pekalongan

Pekalongan, November 2023

Ketua Tim Peneliti,

M. Haidar Fikri Kurniali

Manarul Hidayat

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN

CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197507291994121001

RINCIAN DOKUMEN

Judul Dokumen	Laporan Studi Antropologi: Konstruksi Sosial pada Kemiskinan di Kota Pekalongan
Tanggal	15 November 2023
Versi	v.01
Penulis	Manarul Hidayat, M. Erika Rachman, M. Haidar Fikri Kurniali, M. Rayhan I'tisham, Rangga Setya Nugraha, Mutiara Kartika Dewi, Amalia Ida Gunawanti
Penyunting	Manarul Hidayat, M. Najmul Afad
Ditujukan Kepada	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

VERSI	TANGGAL	PENULIS	DITINJAU OLEH	STATUS
v.00	25/09/2023	Lingkar Kajian Kota Pekalongan	Prof. Pujo Semedi	Laporan Antara
v.01	15/11/2023	Lingkar Kajian Kota Pekalongan	Prof. Pujo Semedi	Laporan Akhir

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINCIAN DOKUMEN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
GLOSARIUM DAN DAFTAR SINGKATAN	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
1. Ruang Lingkup Pembahasan	2
2. Ruang Lingkup Lokasi	3
D. Kajian Literatur	5
1. Nelayan	5
2. Petani.....	6
3. Buruh Batik	7
4. Serabutan	8
E. Kerangka Teori	8
F. Metode	10
G. Luaran	12
H. Linimasa Pelaksanaan	12
KOMUNITAS NELAYAN	13
A. Ekologi	13
B. Mode Produksi	15
C. Relasi Sosial Produksi	17
D. Intervensi Pembangunan	19
KOMUNITAS PETANI	22
A. Ekologi	22
B. Mode Produksi	24
C. Relasi Sosial Produksi	25
D. Intervensi Pembangunan	27

KOMUNITAS BURUH BATIK	28
A. Ekologi	28
B. Mode Produksi	30
C. Relasi Sosial Produksi.....	31
D. Intervensi Pembangunan.....	33
KOMUNITAS SERABUTAN	35
A. Ekologi	35
B. Mode Produksi	37
C. Relasi Sosial Produksi.....	39
D. Intervensi Pembangunan.....	40
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	41
A. Kesimpulan.....	41
1. Kemiskinan Komunitas Nelayan di Kampung Pegirian Kelurahan Krapyak.....	41
2. Kemiskinan Komunitas Petani di Kampung Yosorejo Kelurahan Kuripan Yosorejo	41
3. Kemiskinan Komunitas Buruh Batik di Kampung Jenggot Tengah Kelurahan Jenggot ..	42
4. Kemiskinan Komunitas Serabutan di Kampung Nggodang Kelurahan Kauman	42
B. Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi	5
Gambar 2.1 Kampung Pegirian (Lampau).....	13
Gambar 2.2 Kampung Pegirian (Krapyak).....	13
Gambar 2.3 Nelayan di Sungai Kupang 1870.....	14
Gambar 2.4 Kepemilikan Perahu Sopek	14
Gambar 2.5 Persiapan Nelayan Sopek.....	16
Gambar 2.6 Jaring yang Diperbaiki Kiteng.....	16
Gambar 2.7 Wawancara dengan nelayan sopek	18
Gambar 2.8 Tengkulak Mengangkut Hasil.....	18
Gambar 2.9 Kotak Cerita: Utang Nelayan Sopek	19
Gambar 3.1 Kampung Yosorejo (Lampau).....	22
Gambar 3.2 Kampung Yosorejo (Kuripan)	22
Gambar 3.3 Sawah di Kampung Yosorejo.....	23
Gambar 3.4 Sumur untuk Sawah	23
Gambar 3.5 Buruh Tani Menanam Padi	25
Gambar 3.6 Sawah Belum Ditanami	25
Gambar 3.7 Wawancara dengan Buruh Tani.....	26
Gambar 3.8 Rice Mill.....	26
Gambar 4.1 Kampung Djinggot (Lampau)	28
Gambar 4.2 Kampung Jenggot Tengah (Jenggot).....	28
Gambar 4.3 Pranggok di Kota Pekalongan 1910-1930	29
Gambar 4.4 Pranggok di Kampung Jenggot Tengah.....	29
Gambar 4.5 Buruh Batik Membuat Batik Cap.....	30
Gambar 4.6 Kegiatan Produksi Kuli Keceh.....	30
Gambar 4.7 “Bursa Kerja” Buruh Batik	32
Gambar 4.8 Pranggok di Kampung Jenggot Tengah.....	32
Gambar 5.1 Kampung Nggodang (Lampau).....	35
Gambar 5.2 Kampung Nggodang Kauman.....	35
Gambar 5.3 Suasana Jl. Hayam Wuruk 1920	35
Gambar 5.4 Rob Rembesan di Kampung Nggodang.....	35
Gambar 5.5 Kotak Cerita: Kegiatan Produksi Serabutan	36
Gambar 5.6 Wawancara dengan Serabutan.....	37
Gambar 5.7 Gang Kampung Nggodang	37
Gambar 5.8 Wawancara dengan Makelar	39
Gambar 5.9 Pengambilan Sanggan Menjahit	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis Sektor Prioritas terhadap Lokasi Studi.....	3
Tabel 1. 2 Klasifikasi Informan	11
Tabel 1.3 Linimasa Pelaksanaan	12

GLOSARIUM DAN DAFTAR SINGKATAN

ATBM	: Alat Tenun Bukan Mesin
Bantuan Sembako	: Bantuan Sembilan Bahan Pokok
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
BST	: Bantuan Sosial Tunai (BST)
GEE	: Google Earth Engine
GT	: Gross Tonnage
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian ATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Komunitas	: Sekumpulan individu dalam skala yang lebih kecil dan relatif memiliki karakteristik sama
KP2B	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LSD	: Lahan Sawah Dilindungi
Masyarakat	: Sekumpulan individu dalam skala yang lebih besar dan relatif memiliki karakteristik beragam
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PKH	: Program Keluarga Harapan (PKH), serta
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kajian literatur, kerangka teori, metode, luaran, serta jadwal pelaksanaan.

A. Latar Belakang

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) secara umum dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap penghasilan dan layanan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai cita-cita global menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Sebanyak 25.498 keluarga di Kota Pekalongan masuk dalam kemiskinan ekstrem, berdasarkan data P3KE tahun 2023.¹ Jumlah keluarga tersebut secara keseluruhan menyerap 42.428 bantuan, dengan 978 keluarga di antaranya menerima lima jenis bantuan sekaligus. Bantuan ini mencakup BPNT, BPUM, BST, PKH, serta Bantuan Sembako.

Angka di atas terbilang tinggi mengingat jumlah keluarga di Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 102.575.² Artinya keluarga miskin ekstrem mencapai 24%. Hal ini tidak sejalan dengan angka penduduk miskin Kota Pekalongan yang diterbitkan BPS, yaitu 6,81% pada tahun 2023. Ketimpangan tersebut tidak cukup disikapi dengan penyelarasan definisi kemiskinan, karena hal tersebut tetap tidak mengubah kenyataan bahwa terma kemiskinan yang digunakan tidak datang dari masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Kota Pekalongan merupakan wilayah yang dalam beberapa catatan diakui memiliki potensi besar melalui aset ekonomi dan aset budaya. Batik misalnya, telah berperan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sejak tahun 1800-an (Elliot, 2004). Selain itu, perikanan juga menjadi andalan masyarakat sejak abad ke-17, seperti halnya beberapa daerah lain di utara Pulau Jawa (Yuwono, 2001). Dua sektor tersebut menjadi yang paling utama dalam menopang

¹ Kemenko PMK Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan pada 7 Februari 2023.

² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2023.

pertumbuhan Pekalongan dalam waktu lama, hingga akhirnya kini mampu berdiri sebagai perkotaan yang sibuk. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat dan wilayahnya perlu diperhatikan dalam melihat kemiskinan di Kota Pekalongan.

Kemiskinan di Kota Pekalongan harus dilihat sebagai kemiskinan perkotaan, yang ditandai oleh keragaman mata pencaharian tetapi berujung pada kondisi ekonomi yang sama yaitu pada rendahnya penghasilan dan kerentanan ekonomi pekerjanya (Lan, 2019). Kerentanan merupakan konstruksi sosial, maksudnya keadaan serba rapuh tersebut dibentuk oleh relasi-relasi sosial yang ada. Oleh karena itu, studi ini menanyakan, relasi-relasi sosial seperti apa yang berlangsung dalam kegiatan produktif di Kota Pekalongan, sehingga justru menciptakan kemiskinan alih-alih kemakmuran.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, tujuan dari kegiatan studi yang dilaksanakan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dibentuk oleh relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam kegiatan produktif di Kota Pekalongan.

C. Ruang Lingkup

Pada bagian ini, dijelaskan ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup lokasi studi disertai dasar yang digunakan.

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Studi ini menggunakan sudut pandang ekonomi politik dengan pengembangan yang dilakukan oleh sejumlah antropolog. Atas dasar tersebut, konstruksi sosial atas kemiskinan tidak hanya dibahas melalui mode produksi dan relasi sosial produksi, tetapi juga melalui ekologi³ dan intervensi pembangunan⁴ suatu komunitas. Adapun lingkup masing-masing pembahasan adalah sebagai berikut:

³ Narotzky (1997) mengembangkan materialisme historis dengan menempatkan ekologi sebagai produk dari proses sosiohistoris yang menitikberatkan pada pengaruh ruang (*space*) dan sumber daya (*resources*) terhadap kehidupan manusia (*populations*).

⁴ Pengembangan materialisme historis dengan intervensi pembangunan salah satunya dilakukan oleh Nancy Peluso (1994) untuk melihat hubungan kebijakan pertanian dan kehutanan dengan kehidupan masyarakat.

- a) **Ekologi:** Tinjauan lingkungan dan sumber daya yang menjadi basis kegiatan produksi di masing-masing lokasi studi. Di sini dibahas jenis dan sifat sumber daya yang menjadi objek produksi.
- b) **Mode Produksi:** Tinjauan atas kegiatan penciptaan barang dan jasa. Di sini dibahas persoalan siapa mengerjakan apa.
- c) **Relasi Sosial Produksi:** Tinjauan atas hubungan sosial yang berlangsung dalam kegiatan penciptaan barang dan jasa. Di sini dibicarakan siapa mendapatkan hasil apa.
- d) **Intervensi Pembangunan:** Tinjauan atas program-program pembangunan yang diarahkan pada kegiatan produksi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di sini dibahas apakah jenis intervensi tersebut tepat dan apakah benefit didistribusi secara merata di kalangan orang yang bekerja di sektor produksi tersebut.

2. Ruang Lingkup Lokasi

Seperti studi antropologi pada umumnya, studi ini dilakukan dalam skala komunitas atau kampung. Sebelum menentukan lokasi spesifik, terlebih dahulu ditentukan empat sektor yang menjadi prioritas untuk dilakukan studi kemiskinan dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Analisis Sektor Prioritas terhadap Lokasi Studi

NO	SEKTOR	ANALISIS
1	Perikanan	Perikanan merupakan sektor pekerjaan yang sebagian besar diisi oleh rumah tangga miskin. Menurut Goso dan Anwar (2017) terdapat 14,48 juta dari 16,2 juta nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan sebagian besar dari mereka adalah nelayan tradisional. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Krapyak yang memiliki riwayat sebagai basis nelayan tradisional. ⁵
2	Pertanian	Pertanian merupakan sektor pekerjaan sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia. Menurut BPS (2022) terdapat 49,89 persen rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Kuripan Yosorejo yang menjadi tempat bagi 13% lahan pertanian Kota Pekalongan. ⁶
3	Industri Batik	Industri batik merupakan sektor pekerjaan unggulan yang identik dengan Kota Pekalongan. Pada sektor industri batik, menurut Sari (2011) terdapat banyak buruh batik usia anak yang berasal dari

⁵ Nelayan tradisional di Kelurahan Krapyak disebut Yuwono (2001) menjual hasil tangkapan ikan di pelabuhan pasca 1924 tidak lagi digunakan sebagai pelabuhan ekspor komoditas dari pedalaman.

⁶ Luas lahan pertanian di Kelurahan Kuripan Yosorejo adalah 109 hektar dari 832 hektar luas lahan pertanian di Kota Pekalongan (Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 2022).

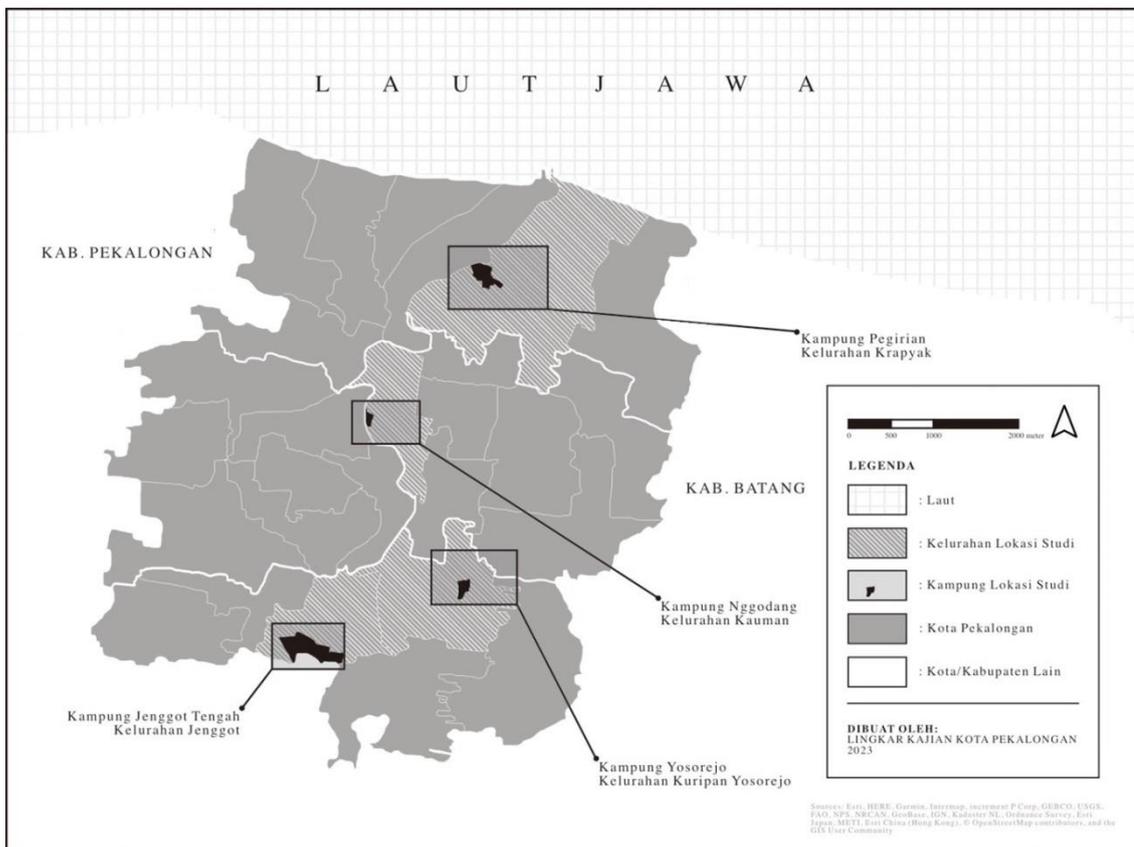
NO	SEKTOR	ANALISIS
		keluarga miskin. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Jenggot yang menjadi tempat bagi 22% industri batik Kota Pekalongan. ⁷
4	Serabutan	Serabutan merujuk pada bentuk-bentuk ketidakpastian pekerjaan yang jamak dialami komunitas miskin. Ketika tim melakukan investigasi awal studi lapangan di Kelurahan Kauman, Udin, salah seorang warga, menyebutkan bahwa di tempat tinggalnya cukup banyak penerima bantuan pemerintah yang bekerja serabutan, termasuk dirinya. Oleh karena itu, studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Kauman.

Melalui analisis di atas, ditetapkan bahwa prioritas sasaran studi kemiskinan ini adalah komunitas nelayan di Kelurahan Krapyak, komunitas petani di Kelurahan Kuripan Yosorejo, komunitas buruh batik di Kelurahan Jenggot dan komunitas serabutan Kelurahan Kauman. Selanjutnya, studi ini dilakukan secara spesifik pada kampung yang diketahui sebagai konsentrasi komunitas miskin melalui investigasi awal studi lapangan. Empat komunitas dan kampung tersebut adalah:

- a) Komunitas nelayan miskin di Kampung Pegirian, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara;
- b) Komunitas petani miskin di Kampung Yosorejo, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan;
- c) Komunitas buruh batik miskin di Kampung Jenggot Tengah, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
- d) Komunitas serabutan miskin di Kampung Nggodang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur.

Adapun terkait sebaran keempat lokasi spesifik studi ini, tersaji pada **Gambar 1.1** di bawah ini.

⁷ Jumlah industri batik di Kelurahan Jenggot adalah 203 dari 917 industri batik yang terdapat di Kota Pekalongan (Budiyanto, dkk., 2018).



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 1.1 Peta Lokasi Studi

D. Kajian Literatur

Pada bagian ini disajikan konsep-konsep umum terkait relasi sosial komunitas nelayan, petani, buruh batik dan serabutan.

1. Nelayan

Nelayan (*fisherman*) secara umum digunakan untuk menyebut seseorang yang melakukan pekerjaan di sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Istilah “nelayan” diadaptasi dari bahasa Tamil “*nallayar*” yang kemudian diserap dalam bahasa Sansekerta menjadi “*nallayan*”, yakni seseorang yang menggantungkan hidup dari air (Badudu dan Zain, 1994). Kehidupan nelayan sangat berbeda dengan petani yang harus menanam untuk memetik, nelayan justru lebih seperti pemburu dan peramu yang tidak melakukan investasi terhadap alam (Yuwono, 2001). Nelayan tidak melibatkan dirinya dalam proses reproduksi sumber daya alam yang mereka ambil.

Menurut Mulyadi dalam Suyanto (2013) nelayan bukan merupakan entitas tunggal, mereka dapat dibedakan melalui kepemilikan alat tangkap, yakni:

- a) Nelayan Juragan, yakni nelayan yang memiliki alat tangkap modern dengan skala besar. Kegiatan penangkapan ikan tidak secara langsung dilakukan oleh mereka, tetapi oleh nelayan buruh yang bekerja pada mereka;
- b) Nelayan Tradisional (perorangan), yakni nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri dengan skala kecil. Lazimnya kegiatan penangkapan ikan dilakukan seorang diri atau bersama kerabat;
- c) Nelayan Buruh, yakni nelayan yang tidak memiliki alat tangkap sendiri, namun bekerja dengan alat tangkap milik nelayan juragan.

Secara jumlah, nelayan juragan jauh lebih sedikit daripada nelayan tradisional dan nelayan buruh. Perbedaan kepemilikan modal melahirkan perbedaan kondisi ekonomi, nelayan juragan menjadi nelayan yang kaya, sedangkan nelayan tradisional dan nelayan buruh menjadi nelayan yang miskin (Winahyu dan Santiasih, 1993).

2. Petani

Definisi petani dalam kajian masyarakat merujuk pada dua istilah, yakni *farmer* dan *peasant* yang dibedakan dari tujuan mereka bertani. *Farmer* menurut Soetrisno (1999) merupakan petani dengan lahan luas dan sebagian besar hasil pertanian dijual untuk memperoleh keuntungan, dalam definisi Wolf (1983) *farmer* juga merujuk pada petani modern di tengah kota yang menggunakan rumah kaca (*greenhouse*). Adapun yang dimaksud *peasant* ialah petani kecil yang memiliki atau menyewa lahan terbatas sehingga hasil pertanian cenderung dikonsumsi sendiri sehingga disebut pula petani subsisten (Soetrisno, 1999). *Peasant* dalam hal ini lebih rentan daripada *farmer*, karena sekali saja gagal panen, maka keberlangsungan hidup mereka akan terancam.

Lebih lanjut, *farmer* tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk mengolah lahannya. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern agar hasil produksi meningkat dan bernilai tinggi, sebagaimana yang dilakukan seorang pengusaha profesional, sehingga *farmer* disebut pula *agriculture entrepreneur* (Rahardjo, 1999). Selain itu, *farmer* dapat dengan tenang memperoleh hasil pertanian karena berada di puncak struktur sosial yang oleh Sugiyati (1997) disebut terdiri dari:

- a) Petani Pemilik, yakni petani yang memiliki lahan pertanian luas dan cenderung menempatkan petani penggarap atau buruh tani untuk mengolahnya;
- b) Petani Penggarap, yakni petani yang mengelola lahan pertanian bukan miliknya melalui sistem bagi hasil;
- c) Buruh Tani, yakni petani yang diupah untuk mengelola lahan pertanian, mulai dari pembajakan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan.

Petani subsisten dengan lahan terbatas dan buruh tani disebut Sugiyati (1997) sebagai petani yang berada dalam kondisi miskin bukan hanya karena rendahnya hasil pertanian, tetapi juga karena kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi.

3. Buruh Batik

Buruh batik berkaitan dengan pengrajin batik yang telah eksis sejak tahun 1800-an. Pengrajin batik melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil dan umumnya terjalin hubungan erat antara pengrajin satu dengan pengrajin lainnya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kerajinan batik secara pesat berubah menjadi industri skala besar, hal ini dilatarbelakangi penemuan teknik *printing* serta ambisi industri padat modal melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 (Hayati, 2012). Pada titik tersebut, industri batik mulai memunculkan posisi baru sebagai buruh batik yang dituntut lebih produktif. Berikut ini adalah struktur sosial yang lazim dalam industri batik:

- a) Juragan Batik, yaitu pemilik modal dan tempat produksi. Mereka tidak terlibat langsung dalam ruang produksi;
- b) Buruh Batik, yaitu pekerja upahan yang membuat kain/pakaian batik untuk juragan batik.

Buruh batik terikat pada perjanjian kerja tidak tertulis dengan juragan batik dan lazimnya mengerjakan tugasnya di rumah juragan. Buruh batik dapat dibedakan menjadi dua, antara mereka yang telah bekerja pada juragan batik tertentu dan mereka yang hanya bekerja secara musiman/panggilan. Buruh batik musiman ketika sedang tidak bekerja di sektor industri batik, dapat bekerja serabutan seperti menjadi pedagang, buruh tani hingga buruh bangunan (Kadarwati, 2009).

4. Serabutan

Serabutan (*precariat* atau *precarious proletariat*) merupakan salah satu dari enam kelas dalam struktur kelas baru. Menurut Standing (2011) adanya posisi serabutan (*precariat*) merupakan pengembangan dari struktur kelas sebelumnya, akibat ketidaksetaraan dan pergerakan dunia menuju pasar tenaga kerja fleksibel. Berikut struktur kelas yang digagas oleh Standing (2014):

- a) *Plutocracy* dan *elite* di posisi puncak, ialah mereka yang memperoleh *rentier income* (penghasilan dari modal tanpa kerja) serta memegang kekuatan politik;
- b) *Salariat* dalam hal penghasilan terpaut jauh dari kelas di atasnya. Akan tetapi *salariat* memiliki jaminan pekerjaan dan beragam tunjangan non-upah seperti pensiun, liburan, kesehatan, serta cuti;
- c) *Proficians* atau *professional and technician* ialah mereka yang tidak mencari jaminan pekerjaan, tetapi menghasilkan uang dengan hingar-bingar di tengah ancaman kelelahan;
- d) *Proletariat* atau kelas pekerja inti yang bekerja penuh waktu, mereka kini kian menyusut dan layu solidaritas sosialnya;
- e) *Precariat* ialah para pekerja temporer, mereka yang tidak memiliki jaminan dan sangat rentan untuk jatuh ke kelas paling rendah;
- f) *Lumpen-proletariat* merupakan kelas paling rendah, merujuk pada mereka yang hidup di jalanan.

Secara garis besar, serabutan terkait pekerjaan yang tidak jelas waktunya, tidak konsisten *sektornya*, tidak pasti jaminannya, dan tidak sesuai kapasitasnya. Karena itu mereka menjadi sangat rentan, sekali saja melakukan kesalahan, mereka dapat langsung menjadi *lumpen-proletariat*.

E. Kerangka Teori

Sudut pandang ekonomi politik melihat bahwa kelas dibangun berdasarkan relasi-relasi sosial produksi (Bernstein, 2010). Sebuah kelas hanya dapat diidentifikasi melalui relasi sosial dengan kelas lain, baik relasi tersebut berupa eksploitasi langsung, eksploitasi tidak langsung, ataupun eksploitasi diri yang menguntungkan kelas atas. Ia memberi contoh bahwa petani menengah yang disebut oleh pemerintah kolonial sebagai gambaran ideal petani mandiri, juga

merupakan produk diferensiasi kelas karena proses komodifikasi telah menaikkan biaya dan risiko, serta meningkatkan persaingan dalam perebutan tanah dan/atau tenaga kerja. Untuk melihat relasi sosial dalam kegiatan produksi, ia mengonseptualisasi pertanyaan berikut ini:

1) *Siapa memiliki apa?*

Kepemilikan (*ownership*) dan properti (*property*) memiliki arti yang berbeda-beda bagi tipe masyarakat yang berbeda pada momen sejarah yang berbeda. Gagasan dan praktik kepemilikan pribadi dan barang milik pribadi ditemukan dalam konteks kapitalisme dan membantu untuk menjelaskan kapitalisme itu sendiri. Persoalan ini sangat terkait dengan sumber daya yang merupakan basis kegiatan produksi. Bernstein (2010) memberi contoh karakteristik kapitalisme berupa basis kegiatan pertanian berupa lahan yang dikonversi menjadi barang milik pribadi atau komoditas.

2) *Siapa melakukan apa?*

Pertanyaan kedua adalah mengenai pembagian kerja secara sosial. Pihak yang melakukan kegiatan produksi telah terstruktur oleh berbagai relasi sosial. Hal itu terjadi, misalnya, di antara mereka yang mengerjakan tugas-tugas khusus dalam unit-unit produksi para produsen yang membuat jenis-jenis barang yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan, dan di antara kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat agraris dan masyarakat kapitalis.

3) *Siapa mendapatkan apa?*

Pertanyaan ini adalah mengenai pembagian hasil kerja secara sosial, atau kerap disebut distribusi pendapatan. Pendapatan di sini tidak terbatas pada uang, tetapi juga hasil kerja yang tidak berwujud uang seperti pangan yang dikonsumsi sendiri, hasil kerja domestik dan kerja lain yang tidak berbayar. Lantas pertanyaan berlanjut pada relasi-relasi sosial dalam konsumsi, reproduksi dan akumulasi atas hasil kerja yang didapatkan. Bernstein (2010) menguraikannya sebagai biaya konsumsi, biaya penggantian dan biaya kegiatan, yang ditambah biaya renten seiring terbangunnya masyarakat agraris yang terbagi atas kelas.

4) *Pembangunan mengintervensi apa?*

Pertanyaan terakhir berkaitan dengan pengaruh program pembangunan terhadap perubahan relasi sosial produksi. Bernstein (2010) memberi contoh

modernisasi pertanian yang mengarahkan petani bergantung pada penghasilan berupa uang untuk membayar pajak, sewa, serta membeli barang-barang konsumsi yang tidak dapat lagi disediakan melalui tenaga sendiri termasuk pupuk, benih, dan peralatan pertanian.

Konsep di atas dapat digunakan pada tempat dan skala kegiatan ekonomi yang berlainan, dari rumah tangga sampai komunitas, bahkan struktur kelas ekonomi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Pertanyaan tersebut juga dapat diterapkan pada jenis-jenis komunitas yang berbeda pada momen sejarah yang berbeda.

F. Metode

Studi kualitatif ini dilakukan selama 10 pekan di empat lokasi dengan karakteristik komunitas berbeda, yaitu 1) komunitas nelayan miskin di Kampung Pegirian, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara; 2) komunitas petani miskin di Kampung Yosorejo, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan; 3) komunitas buruh batik miskin di Kampung Jenggot Tengah, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan; dan 4) komunitas serabutan miskin di Kampung Nggodang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur.

Pada pekan pertama dan kedua, tim melakukan wawancara dengan pemerintah di empat kelurahan yang hasilnya menentukan kampung fokus studi berdasarkan konsentrasi dan karakteristik DTKS. Tim di masing-masing kampung melakukan pengumpulan data melalui pengamatan partisipatif (*participant observation*) dan wawancara etnografis (*ethnographic interview*). Tim mula-mula menceburkan diri dalam situasi sosial (*social situation*) komunitas dengan mengikuti arus perbincangan santai di warung dan teras rumah, empati ditunjukkan terhadap persoalan-persoalan yang mereka utarakan. Hal tersebut efektif membangun kedekatan antara tim dengan komunitas, sehingga pintu partisipasi tim dalam kegiatan produktif komunitas semakin terbuka. Tim diajak dalam proses penjualan hasil tangkapan ikan, penggilingan padi, pembuatan batik cap, hingga menyiapkan gerobak jualan. Pengamatan partisipatif ini dalam kacamata Spradley (1980) berlangsung dalam tingkatan menengah (*moderate*).

Beriringan dengan pengamatan partisipatif, wawancara etnografis dilakukan dengan kecenderungan waktu pagi hari dengan nelayan, sore hari dengan petani,

serta malam hari dengan buruh batik dan serabutan. Hal ini mempertimbangkan perbedaan ketersediaan waktu yang dimiliki informan di masing-masing kampung (Spradley, 1979). Untuk memastikan kelengkapan data, tim menentukan informan secara bertujuan (*purposive*) dengan kriteria dan unsur sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Klasifikasi Informan

NO	KRITERIA	UNSUR	KETERANGAN
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Informan yang berjenis kelamin laki-laki
2		Perempuan	Informan yang berjenis kelamin perempuan
3	Kelompok Usia	Produktif	Informan yang berusia 15-64 tahun
4		Non-Produktif	Informan yang berusia <15 dan >64 tahun
5	Kerentanan	Lanjut Usia	Informan yang berusia 65 tahun atau lebih
6		Penyintas Bencana	Informan yang selamat dari bencana
7		<i>Stunting</i>	Informan yang terdapat <i>stunting</i>
8		Putus Sekolah	Informan yang terdapat anak tidak sekolah
9	Kelompok Miskin	Nelayan	Informan nelayan miskin
10		Petani	Informan petani miskin
11		Buruh Batik	Informan buruh batik miskin
12		Serabutan	Informan serabutan miskin
13	Peran Sosial	Pemerintahan	Informan bidang pemerintahan
14		Agama dan Budaya	Informan bidang agama dan budaya
15		Ekonomi	Informan bidang ekonomi

Sumber: LKKP (2023)

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara etnografis meliputi 1) kondisi lingkungan dan sumber daya; 2) kegiatan produksi dan pembagian kerja; 3) perolehan dan peruntukan hasil kerja; serta 4) program-program pembangunan yang diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan komunitas terkait.

Sebagai pendukung yang tidak kalah penting, kajian literatur (*literature review*) dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) juga menjadi teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam studi. Kajian literatur membantu memastikan bahwa studi ini memiliki pijakan, arah dan hasil yang kuat. Adapun diskusi kelompok terpumpun studi ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memahami isu kemiskinan dan isu masyarakat di lokasi studi. Melalui diskusi kelompok terpumpun, temuan studi ini diperkuat, dikritisi, serta diverifikasi oleh para pemangku kepentingan.

G. Luaran

Luaran yang dihasilkan dari berlangsungnya studi ini meliputi:

- 1) Laporan Studi Antropologi Konstruksi Sosial pada Kemiskinan di Kota Pekalongan; serta
- 2) Artikel Jurnal terkait kemiskinan di Kota Pekalongan

H. Linimasa Pelaksanaan

Tabel di bawah ini merupakan linimasa bulanan dalam pelaksanaan studi, rincian waktu dan frekuensi akan senantiasa dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 1.3 Linimasa Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1	Koordinasi dan <i>Workshop</i> Perencanaan										
2	Penyusunan Rencana Studi										
3	Penentuan Lokasi Spesifik										
4	Studi Lapangan dan Analisis Temuan										
5	Koordinasi dan <i>Workshop</i> Pelaporan										
6	Ekspos Laporan Studi (Antara)										
7	Presentasi Laporan Studi (Akhir)										
8	Finalisasi										

KOMUNITAS NELAYAN

A. Ekologi

Ekologi Laut Pekalongan merupakan sumber daya yang menjadi basis kegiatan produksi komunitas nelayan di Kampung Pegirian, khususnya oleh nelayan sopek. Laut Pekalongan yang dimanfaatkan nelayan sopek berstatus sumber daya bersama yang bebas diakses oleh siapa saja. Nelayan sopek dari Kampung Pegirian berbagi laut dengan nelayan lain dari berbagai daerah dan berbagai ukuran perahu atau kapal. Pada umumnya, pemanfaatan sumber daya semacam ini cenderung berupa ekstraksi yang mengarah pada eksploitasi.

Nelayan sopek melakukan ekstraksi berbagai sumber daya alam hewani di Laut Pekalongan, seperti cumi, udang, ikan teri hingga ikan kakap merah. Masing-masing jenis tangkapan memiliki konsentrasi area tersendiri di lautan yang dipahami oleh nelayan sopek. Intensifnya kegiatan penangkapan ikan membuat nelayan bergeser dari berbagi sumber daya menjadi berebut sumber daya. Hasil tangkapan saat ini dirasakan penurunannya oleh nelayan sopek, sehingga mereka rutin berpindah area tangkap untuk menghindari eksploitasi berlebih pada satu area.



Sumber: Topografische Inrichting (1918)

Gambar 2.1 Kampung Pegirian (Lampau)



Sumber: LKKP diolah dari GEE (2023)

Gambar 2.2 Kampung Pegirian (Krapyak)

Kondisi sumber daya di Laut Pekalongan memiliki keterkaitan dengan dinamika Pelabuhan Pekalongan⁸ dan komunitas nelayan. Pelabuhan Pekalongan mulai lengang pasca statusnya diturunkan dari pelabuhan menengah menjadi pelabuhan kecil pada 1924. Hal ini dilatarbelakangi menurunnya ekspor komoditas pedalaman, yang oleh Belanda digabungkan pengirimannya melalui Pelabuhan

⁸ Pelabuhan Pekalongan sekarang dikenal dengan nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).

Semarang. Kegiatan di Pelabuhan Pekalongan kemudian diisi dengan kegiatan sejumlah nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan dan menyandarkan perahu maupun kapal di Sungai Loji. Sektor perikanan semakin meningkat, terlebih dengan adanya program modernisasi nelayan sejak 1955 dan dibukanya pelelangan ikan.

Nelayan yang sebelumnya banyak memiliki dan menggunakan perahu tradisional, perlahan mulai berkurang. Tidak hanya karena tergantikan dengan perahu motor, tetapi juga karena beberapa nelayan tradisional beralih menjadi anak buah kapal pukat (*trawl*) atau menjadi nelayan buruh.⁹ Berubah menjadi anak buah kapal pukat menjadi pilihan sebagian nelayan tradisional karena penghasilan hariannya sepuluh kali lebih tinggi (Satria, 2000). Periode kapal pukat diakhiri dengan larangan operasi melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl¹⁰ karena merusak ekologi laut.



Sumber: National Museum van Wereldculturen

Gambar 2.3 Nelayan di Sungai Kupang 1870



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 2.4 Kepemilikan Perahu Sopek

Nelayan buruh yang terdesak, sebagian memilih untuk mengikuti program kredit perahu sopek karena menjadi satu-satunya pilihan masuk akal jika tetap ingin melaut. Perahu sopek merupakan perahu mesin berukuran kecil yang memungkinkan menjangkau area tangkap lebih jauh dan memangkas waktu perjalanan.¹¹ Bagi mereka yang tidak bertaruh dengan kredit, memilih untuk menjadi tukang jaring (*kiteng*) dengan bekal pengalaman memperbaiki jaring sebelumnya. Riwayat panjang tersebut menjadi dasar komunitas nelayan di

⁹ Penggunaan kapal pukat di Kota Pekalongan diawali dengan kedatangan nelayan dari Pulau Sumatra yang membawa kapal tersebut pada 1972.

¹⁰ Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diperkuat melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

¹¹ Wawancara dengan Fatakhun pada Juli 2023.

Kampung Pegirian memahami bahwa hasil tangkapan di Laut Pekalongan mengalami penurunan.

Selain mengalami penurunan hasil tangkapan ikan, nelayan sopek di Kampung Pegirian juga juga terbatas dalam kepemilikan faktor produksi yang dimiliki secara pribadi. Perahu mesin berukuran sekitar 5 GT merupakan sarana produksi utama yang mereka gunakan dengan disertai alat tangkap berupa *payang* berbagai ukuran. Perawatan mereka lakukan ala kadarnya karena tidak memungkinkan bagi mereka mengalokasikan penghasilan untuk perawatan maksimal, terlebih dengan biaya solar yang memangkas separuh hasil melaut. Hal ini tercermin dari harga perahu yang mencapai 30.000.000 rupiah dengan penggantian mesin baru seharga 7.000.000 yang dapat diperlukan sewaktu-waktu.¹² Semakin banyaknya tersebut memiliki andil dalam kemiskinan yang mereka alami.

Komunitas nelayan di Kampung Pegirian kian jauh dari kemakmuran dengan adanya ketidakpastian untuk dapat melakukan kegiatan produksi setiap hari. Ketidakpastian ini berlaku baik untuk mereka yang menjadi nelayan sopek, maupun yang menjadi *kiteng*. Nelayan sopek tidak dapat melaut ketika musim ombak atau cuaca buruk, sedangkan *kiteng* bergantung pada ada atau tidaknya pesanan untuk memperbaiki jaring. Momen ketika mereka tidak memiliki penghasilan ini dapat memperburuk kemiskinan pada komunitas nelayan di Kampung Pegirian.

B. Mode Produksi

Nelayan sopek merupakan orang yang paling sibuk dalam kegiatan produksi di Kampung Pegirian. Mereka lebih sering melaut sore dan mendarat pagi daripada melaut pagi mendarat sore. Alasannya, ketika malam ikan akan aktif dan bergerombol di bawah cahaya lampu, sehingga lebih mudah dijaring. Makmur misalnya, ia bersiap sejak pukul 13.00 WIB dengan membeli solar. Untuk sekali melaut ia mematok 25 liter solar yang ia peroleh dengan harga sekitar 200.000 rupiah. Harga tersebut bergantung harga solar yang ia beli, karena tidak setiap waktu ia memperoleh solar subsidi, sedangkan kebutuhan solar dirinya adalah

¹² Wawancara dengan Ghofur pada Juni 2023.

hampir setiap hari, kecuali ketika cuaca buruk (*dino ombak*) datang memaksa nelayan sopek untuk tidak melaut.¹³

Nelayan sopek baru melaut sekitar pukul 16.30 WIB setelah seluruh perbekalan siap, jeriken solar diikat di tiang tengah perahu sopek miliknya. Satu perahu lazim diisi oleh dua orang nelayan. Mereka menempuh perjalanan sekitar 90-120 menit, patokan yang digunakan adalah selama daratan masih terlihat dan keberadaan PLTU Ujungnegoro. Mata mereka harus jeli melihat apa yang mungkin ada di bawah permukaan air hingga berjam-jam. Fajar menyingsing merupakan tanda bahwa ia harus bersiap mendarat. Ia sampai di darat sekitar pukul 07.00 WIB dan siap menjual hasil tangkapan ikan kepada tengkulak. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh nelayan sopek di tengah laut memiliki durasi lebih dari 12 jam, hal ini menunjukkan besaran tenaga yang mereka keluarkan untuk memperoleh penghasilan.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 2.5 Persiapan Nelayan Sopek



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 2.6 Jaring yang Diperbaiki Kiteng

Tengkulak menjadi pihak yang membeli hasil tangkapan nelayan sopek Kampung Pegirian tiap selesai melaut. Kedatangan nelayan sopek ditunggu oleh tengkulak di galangan tempat nelayan sopek Kampung Pegirian berangkat, tepat di pohon kersen dengan tali menjuntai yang mengikat timbangan gantung. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh tengkulak berkaitan dengan distribusi, membeli tangkapan nelayan sopek untuk kemudian menjual kembali ke pedagang di pasar. Nominal tangkapan ikan yang dibeli dari tiap perahu sopek sekitar 450.000 rupiah. Adapun sekali berangkat, tengkulak dapat menampung hasil tangkapan ikan dari tujuh perahu sopek atau bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran uang tengkulak lebih tinggi dari nelayan sopek.

¹³ Wawancara dengan Makmur pada Juni 2023.

Berbeda dengan nelayan sopek yang perlu berbagai sumber daya produksi, *kiteng* justru menempatkan dirinya sebagai sumber daya utamanya. Ghozali merupakan salah satu *kiteng* di Kampung Pegirian yang sebelumnya pernah menjadi nelayan sopek bersama Casmudiono. Ia biasa berangkat untuk memperbaiki jaring pukul 07.30 WIB.¹⁴ Jenis-jenis jaring dipahaminya secara mendalam, mulai dari ukuran lubang hingga material senar. Penghasilan bersih per hari sekitar 95.000 rupiah dengan memperbaiki jaring dari pagi hingga sore. Memperbaiki jaring di malam hari menyulitkan baginya karena perlu kejelian. Adapun ketika *kiteng* tidak memiliki garapan, beberapa di antaranya memperbaiki jaring di lokasi lain untuk sementara waktu, tindakan ini disebut *ngimbat*, Fatakhun merupakan salah satu yang sering melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵

Tidak terdapat jaminan bahwa setiap hari *kiteng* akan memiliki garapan dan penghasilan. Oleh karena itu, sama dengan beberapa tetangga lainnya, istri Ghozali juga melakukan kegiatan kerja sebagai buruh jahit. Hal ini terlihat dengan adanya mesin jahit bermerek Brother di ruang tamu rumahnya. Mesin jahit tersebut merupakan hasil pinjaman juragan batik yang memberikan garapan (*sanggan*). Kegiatan kerja yang dilakukan perempuan di Kampung Pegirian berperan penting terhadap keberlangsungan hidup keluarga nelayan agar dapat kembali melakukan reproduksi kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, temuan ini juga menjadi tanda bahwa pada masyarakat Kampung Pegirian tidak ada norma yang melarang perempuan untuk memperoleh penghasilan. Adapun batasan yang terbaca adalah bahwa kegiatan kerja yang dilakukan perempuan tidak berlangsung jauh di luar kampung, seperti dengan ikut melaut.

C. Relasi Sosial Produksi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam sekali melaut, seorang nelayan sopek biasanya memperoleh penghasilan 100.000 rupiah. Nominal tersebut berasal dari penjualan hasil tangkapan setelah dikurangi biaya solar dan perbekalan, yang kemudian dibagi dua karena secara umum terdapat dua orang dalam satu perahu sopek. Mereka membagi rata uang yang diperoleh karena

¹⁴ Wawancara dengan Ghozali pada Juni 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Fatakhun pada Juli 2023.

menilai bahwa kegiatan produksi yang dilakukan di satu perahu adalah sama. Sekilas nelayan sopek tampak mandiri dan tidak dieksploitasi secara langsung oleh nelayan juragan, tetapi dalam pandangan Bernstein (2010) mereka adalah kelas yang terbentuk dari relasi sosial produksi. Proses komodifikasi hasil tangkapan ikan telah menaikkan biaya dengan adanya kebutuhan solar dan perawatan peralatan produksi. Selain itu risiko dalam kegiatan produksi juga semakin tinggi karena durasi di lautan semakin lama dan sumber daya alamnya semakin diperebutkan, termasuk oleh nelayan dengan skala yang lebih besar. Tidak masuk akal bagi nelayan sopek untuk menangkap ikan dalam waktu singkat sebab hasilnya tidak dapat menutup biaya yang dikeluarkan untuk solar.



Sumber: LKKP (2023)



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 2.7 Wawancara dengan nelayan sopek

Gambar 2.8 Tengkulak Mengangkut Hasil

Pada dasarnya semua nelayan sopek di Kampung Pegirian telah terdaftar sebagai penerima program solar subsidi. Mereka telah memiliki pas kecil yang rutin diperpanjang, tetapi solar tetap menjadi permasalahan tersendiri yang tidak kunjung tuntas. Pas kecil tetap tidak menjamin mereka untuk memperoleh solar subsidi setiap hari karena kosongnya ketersediaan. Ketika tidak ada solar subsidi, tidak ada pilihan lain selain membeli solar dengan harga lebih tinggi. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak membeli solar, maka artinya mereka tidak dapat melaut dan tidak memperoleh penghasilan.

Dalam menjual hasil tangkapan, nelayan sopek memiliki daya tawar yang lemah. Nelayan sopek tidak cukup besar untuk mengakses TPI, sehingga mereka menjual kepada tengkulak yang menunggu di bawah pohon dekat galangan.¹⁶ Pertemuan mereka tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 hingga 2 jam. Tengkulak menentukan harga jenis tangkapan ikan dan berhak menolak hasil tangkapan yang kondisinya kurang baik, tidak ada tawar-menawar di sini. Selalu

¹⁶ Wawancara dengan Sobur pada Juli 2023.

ada hasil tangkapan yang tidak dibeli oleh tengkulak, baik karena ikan *reject* ataupun ikan rucah. Ikan yang tidak terjual tersebut dibawa pulang oleh nelayan sopek untuk diolah sebagai ikan kering. Biasanya ikan kering tersebut akan dijual ketika *dino ombak* tidak memungkinkan mereka untuk melaut.

Pada pukul 05.00 WIB, persis setelah salat Subuh, istri nelayan sopek mengendarai motor Suzuki Shogun biru berkarat dan berhenti di depan gerobak penjual nasi di Kampung Pegirian. Ia utang nasi dan lauk senilai 7.000 rupiah. Rika, penjual nasi, menyampaikan bahwa sehari sebelumnya istri nelayan sopek itu juga utang dengan nominal yang sama. Praktik tersebut dilakukan sebagai strategi agar ketika cuaca cerah, uang yang dimiliki masih cukup digunakan untuk membeli solar. Utang nasi dan lauk tersebut baru dilunasi ketika sudah memperoleh hasil dari melaut. Sebagai sesama komunitas nelayan di Kampung Pegirian, penjual nasi tersebut memahami dan memaklumi praktik uang semacam itu.

Sumber: LKKP (2023)

Gambar 2.9 Kotak Cerita: Utang Nelayan Sopek

Kiteng merupakan bagian dari komunitas nelayan di Kampung Pegirian yang bekerja di galangan. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perbaikan jaring. Jaring yang diperbaiki mayoritas adalah jaring kapal besar. Dari situ, *kiteng* umumnya memperoleh upah 95.000 rupiah dari pemilik galangan atas tugas yang ditunaikan, sehingga jika tidak terdapat pekerjaan maka tidak ada upah. Status mereka biasanya adalah pekerja lepas. Bernstein (2010) menyebut pekerja lepas sebagai akibat kalahnya mereka dalam persaingan kerja. Dalam konteks *kiteng* di Kampung Pegirian, mereka awalnya adalah nelayan atau keturunan nelayan buruh atau anak buah kapal pukat yang kehilangan pekerjaan serta kalah untuk menjadi nelayan sopek. *Kiteng* bergantung pada berlangsungnya ekstraksi sumber daya di Laut Pekalongan yang dilakukan oleh nelayan berbagai skala, menurunnya kegiatan ekstraksi dapat membawa mereka pada kemiskinan yang lebih jauh.

D. Intervensi Pembangunan

Intervensi pembangunan yang secara spesifik mengarah pada kegiatan produksi komunitas nelayan di Kampung Pegirian telah berlangsung sejak dahulu. Larangan penggunaan pukat pada 1980 yang dibarengi program modernisasi perahu sopek tidak serta-merta mengubah nelayan buruh di Kampung Pegirian menjadi nelayan sopek, beberapa di antaranya kalah bersaing dan menjadi *kiteng* dengan status pekerja lepas.

Program solar subsidi dari pemerintah diikuti oleh nelayan sopek di Kampung Pegirian dengan membuat pas kecil yang rutin diperpanjang. Program ini tepat dalam menyoal salah satu aspek penting kegiatan produksi yang dilakukan nelayan sopek, namun belum cukup untuk membawa mereka menuju kemakmuran. Hal ini terkait dengan ketersediaan solar subsidi yang tidak menentu, tidak jarang mereka membeli solar dengan harga lebih tinggi. Adapun ketika nelayan sopek memperoleh solar dengan harga subsidi, rata-rata separuh uang yang diperoleh terpankas biaya membeli solar untuk sekali melaut.

Terdapat inisiasi Yayasan Amanah Kita mengembangkan perahu bertenaga surya di Kelurahan Krapyak sejak tahun 2019. Saat ini perahu berukuran 3 GT ini belum dapat menjadi solusi atas tingginya biaya solar terhadap hasil tangkapan, karena biaya pembuatannya yang mencapai 90.000.000 rupiah. Selain itu, kekuatan baterai hanya mampu mengoperasikan perahu 3 hingga 6 jam tanpa sinar matahari. Hal tersebut masih jauh dari kegiatan produksi nelayan sopek di Kampung Pegirian yang dapat mencapai 12 jam.

Program bantuan kapal sempat diterima oleh kelompok nelayan di Kampung Pegirian. Hanya saja para penerima tidak mengetahui status bantuan tersebut hingga saat ini. Beberapa menuturkan bahwa kapal tersebut tenggelam ketika ada yang menyewa. Nelayan tidak tahu harus berbuat apa, terlebih dengan tidak aktifnya kelompok nelayan di Kampung Pegirian.

Selain program yang spesifik mengarah pada kegiatan produksi, komunitas nelayan di Kampung Pegirian juga menerima program pengentasan kemiskinan lain. Program bedah rumah merupakan salah satu program yang tidak sepenuhnya dapat diserap keluarga nelayan miskin. Hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya uang untuk membayar buruh bangunan, sedangkan bantuan hanya diperuntukkan untuk bahan bangunan saja. Terdapat beberapa dari mereka yang pernah menerima bedah rumah beberapa tahun sebelumnya, kemudian menolak untuk alokasi selanjutnya. Status program bedah rumah sama dengan KIP, yaitu sama-sama diinginkan namun belum sepenuhnya dapat diserap. Berbeda dengan PKH yang dirasakan secara merata oleh keluarga nelayan miskin karena membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Program lain yang dirasakan manfaatnya secara menyeluruh adalah pengecoran jalan kampung dan penataan saluran air. Temuan lapangan

menunjukkan bahwa permukiman di Kampung Pegirian saat ini lebih terlindungi dari banjir dan rob limpasan Sungai Loji. Limpasan Sungai Loji langsung masuk ke saluran air sebelum mencapai permukiman yang ketinggiannya lebih rendah. Selain itu, terdapat permasalahan air yang ditemukan menguat selama studi lapangan, yaitu air bersih dari Pamsimas yang sulit mencapai rumah. Beberapa rumah akhirnya mengandalkan sumur kembali untuk memenuhi kebutuhan air harian.

KOMUNITAS PETANI

A. Ekologi

Basis dari kegiatan produksi yang dilakukan komunitas petani di Kampung Yosorejo adalah ekologi berupa lahan pertanian. Kepemilikan lahan tidak terdistribusi secara merata kepada petani di Kampung Yosorejo sebab kepemilikan yang bersifat pribadi. Lahan ini menjadi sumber daya alam yang dalam kegiatan produksi diolah menjadi sawah. Hingga kini, sawah di Kampung Yosorejo secara umum menjadi bagian dari 521 ha KP2B atau sawah lestari di Kota Pekalongan.¹⁷ Keberadaan sawah secara luas terlindungi melalui peraturan daerah, tetapi secara pemanfaatan tidak dilakukan komunitas petani sepanjang tahun. Hal ini terkait dengan kondisi lingkungan yang belum maksimal dalam mengelola air. Persoalan keterpenuhan kebutuhan air, bersama dengan perubahan musim, secara umum menjadi salah satu faktor tidak stabilnya produksi pertanian di daerah tropis seperti Indonesia.



Sumber: Topografische Inrichting (1918)



Sumber: LKKP diolah dari GEE (2023)

Gambar 3.1 Kampung Yosorejo (Lampau)

Gambar 3.2 Kampung Yosorejo (Kuripan)

Tidak semua petani di Kampung Yosorejo memiliki lahan, sehingga hanya dapat menjadi buruh tani atau menjadi petani penggarap. Lahan yang digarap merupakan hasil lelang lahan sawah pemerintah, kerja sama dengan petani pemilik atau milik juragan tani. Terkait pelelangan, biasanya terdapat pembagian rata antarpetani penggarap yang diatur tiap tahunnya oleh paguyuban tani setempat. Lelang lahan pemerintah ini dilakukan di kantor kelurahan. Selain itu, terdapat pula beberapa yang sebelumnya memiliki lahan dan dijual. Kasus dijual

¹⁷ Angka tersebut merupakan hasil penyesuaian luas LSD dari Kementerian ATR/BPN, dan merupakan materi dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

tersebut berkaitan dengan hasil yang semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan reproduksi, dalam bahasa Bernstein (2010) mereka terdesak oleh beragam pengeluaran hingga rente.

Petani menjadi sumber daya manusia utama yang melakukan pemanfaatan luasnya sumber daya alam sawah di sekitar Kampung Yosorejo. Pengetahuan, teknik dan strategi dalam kegiatan pertanian padi utamanya mereka peroleh secara turun-temurun. Persoalan sulitnya air ketika musim kemarau diatasi mereka dengan membiarkan sawah tidak ditanami padi, belum ada stimulus pihak luar yang mereka terapkan secara berkelanjutan agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam sawah sepanjang tahun. Sebelumnya, mereka pernah menanam jagung, namun tidak berlanjut karena belum dipahaminya akses pemasaran secara pasti oleh sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia petani di Kampung Yosorejo menerima dan menerapkan stimulus yang membawa mereka pada kepastian, seperti dalam hal pemberian modal dan bantuan, serta modernisasi alat bertani.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.3 Sawah di Kampung Yosorejo



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.4 Sumur untuk Sawah

Selain itu, kegiatan pertanian di Kampung Yosorejo juga didukung oleh kepemilikan faktor produksi lain berupa peralatan bertani. Peralatan ini ada yang merupakan kepemilikan sendiri seperti cangkul, tangki semprot dan alkon, serta ada pula peralatan yang sewa seperti traktor atau alat pemanen. Untuk menunjang kebutuhan air sawah, komunitas petani di Kampung Yosorejo tidak semata-mata mengandalkan air dari Irigasi Grabyak, karena tidak adanya kepastian ketersediaan yang berisiko membuat mereka gagal panen. Oleh karena itu, sumur menjadi sumber daya produksi dalam memenuhi kebutuhan air sawah di Kampung Yosorejo.

B. Mode Produksi

Buruh tani merupakan orang yang paling sibuk dalam kegiatan produksi di Kampung Yosorejo. Buruh tani pada dasarnya merupakan orang yang diminta oleh juragan tani selaku pemilik lahan, untuk menggarap lahannya. Mereka biasanya menggarap sawah milik juragan tani di Kampung Yosorejo. Jam kerja buruh tani cenderung sama setiap harinya, yakni berangkat pukul 07.00 WIB dan pulang sekitar pukul 16.00 WIB. Berbeda dengan juragan tani yang tidak perlu ke sawah karena andilnya dalam kegiatan produksi sudah mewujud pada lahan dan modal.

Dalam hal tahapan bertani, baik petani penggarap maupun buruh tani mula-mula akan menyiapkan bedeng bagi benih (*wenih*) yang sudah direndam. Setelah itu sawah utama akan dibajak dan disiapkan aliran air sebagai tempat benih yang siap tanam setelah 25 hari. Setelah tiga minggu, benih bisa dicabut dari bedengan dan mulai ditanam (*tandur*) di sawah dengan disertai jarak agar nantinya ternutrisi dengan baik. Setelah masa tanam selesai, maka tugas petani penggarap dan buruh tani selanjutnya adalah menyangi tanaman (*matun*) di sekitar padi yang berpotensi merusak padi. Selain itu, dalam masa menunggu panen sekitar tiga bulan usia tanam, petani penggarap dan buruh tani juga memberikan pupuk dan membasmi hama. Adapun pupuk yang digunakan di Kampung Yosorejo adalah Phonska.

Menurut Jaya, upah per hari yang ia peroleh sebagai seorang buruh tani di Kampung Yosorejo adalah 100.000 rupiah.¹⁸ Jumlah tersebut tidak berubah apakah berstatus buruh tani lepas maupun buruh tani kontrak, bedanya ketika menjadi buruh tani kontrak terdapat tambahan makanan, minuman dan rokok. Kudung merupakan salah satu buruh tani yang berstatus lepas di Kampung Yosorejo. Ia sudah berusia senja, tetapi dalam beberapa kesempatan dirinya tetap ke sawah.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Jaya pada Juni 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Suhadi pada Mei 2023.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.5 Buruh Tani Menanam Padi



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.6 Sawah Belum Ditanami

Berbeda dengan buruh tani, petani penggarap harus menunggu gabah terjual untuk memperoleh penghasilan. Risiko mereka lebih tinggi karena dalam tiap masa tanam selalu ada potensi gagal panen. Dalam satu tahun, petani penggarap dan buruh tani di Kampung Yosorejo mengalami dua kali masa panen. Mereka membiarkan sawah tidak diolah selama beberapa bulan pada musim kemarau karena sulit memperoleh air. Sawah benar-benar dibiarkan begitu saja. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *bero*, yaitu sistem pembiaran lahan untuk menghindari gagal panen akibat kekeringan, sekaligus teknik alami memulihkan nutrisi yang ada di dalam tanah. Masa rehat semacam ini tidak hanya menjadi sisi rentan petani penggarap, tetapi juga buruh tani di Kampung Yosorejo. Keberadaan Irigasi Gebyak tidak membantu memastikan sawah teraliri air sepanjang tahun. Turunan dari ketidakpastian tersebut salah satunya mewujud pada pilihan beberapa buruh tani untuk beralih menjadi buruh bangunan.

C. Relasi Sosial Produksi

Sebagai orang yang memperoleh penghasilan dari sistem upah, buruh tani otomatis menjalin relasi sosial produksi dengan pemberi upah, dalam hal ini adalah juragan tani. Hitungan upah yang digunakan adalah harian, dengan sifat ikatan terbagi antara kontrak dan lepas. Buruh tani kontrak lebih terjamin karena ditugaskan untuk menyelesaikan satu masa tanam hingga panen, sedangkan buruh tani lepas baru dipanggil untuk bekerja ketika diperlukan.

Kadam merupakan salah satu buruh tani yang hingga kini masih aktif di sawah. Ia dan buruh petani setempat memiliki pengetahuan yang kuat terkait karakteristik pertanian di Kampung Yosorejo. Hal ini diperoleh secara turun-temurun ditambah pengalaman selama bertahun-tahun. Saat ini peluang mereka

semakin kecil dan terancam dengan kecenderungan beberapa juragan yang memilih buruh tani dari luar daerah. Beberapa yang lebih beruntung menjadi petani penggarap lahan pemerintah yang diperoleh secara lelang. Oleh karena itu, profil komunitas miskin di Kampung Yosorejo identik dengan petani penggarap dan buruh tani.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.7 Wawancara dengan Buruh Tani



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 3.8 Rice Mill

Jumlah buruh tani Kampung Yosorejo yang menjalin relasi sosial produksi dengan juragan tani Kampung Yosorejo kini tidak sebanyak dahulu. Relasi keduanya tidak memberi rasa aman bagi buruh tani Kampung Yosorejo untuk menghadapi kehidupan. Beberapa buruh tani memilih beralih menjadi buruh bangunan. Hal ini berkaitan dengan ketidakpastian kegiatan kerja sepanjang tahun. Turunan dari fenomena tersebut adalah semakin banyaknya buruh tani dari luar daerah yang dikontrak oleh juragan tani Kampung Yosorejo. Kontrak tersebut bahkan disertai fasilitas tempat tinggal. Berbeda dengan buruh tani Kampung Yosorejo, buruh tani dari luar daerah tidak jarang masih memiliki atau mengelola binatang ternak sebagai aset sekaligus sumber penghasilan tahunan yang terbilang besar.

Selain itu, dalam kegiatan pertanian, beberapa petani penggarap ataupun petani pemilik penggarap tidak jarang mengalami kendala dalam hal modal produksi. Untuk itu, mereka yang memiliki modal terbatas atau bahkan tidak memiliki modal kemudian melakukan praktik utang. Relasi utang tersebut terjalin dengan pemilik *rice mill*, tempat yang mereka gunakan untuk proses pengolahan hasil panen padi. Hal ini kemudian melahirkan kontrak tidak tertulis bahwa mereka harus menjual gabah hasil panen kepada pemilik *rice mill* yang bersangkutan.

D. Intervensi Pembangunan

Pembangunan dan bantuan yang diberikan di Kampung Yosorejo kepada komunitas miskin secara umum dinilai efektif. Namun, bantuan yang ditujukan untuk sektor pertanian justru dianggap tidak berhasil. Contohnya, sumur yang dibangun oleh pemerintah akhirnya mengalami kerusakan karena spesifikasinya tidak sesuai. Penyediaan pupuk subsidi juga terus berkurang, dan kendala dalam penyediaan alat *combi* yang tidak sesuai dengan permintaan serta spesifikasi lapangan menjadi masalah. Selain itu, perbaikan pengairan belum dilakukan. Di sisi lain, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga.

Salah satu perhatian utama komunitas petani, adalah kebijakan sawah lestari. Meskipun kebijakan ini memiliki niatan positif dalam melestarikan lahan sawah, namun kurang mempertimbangkan fasilitas pendukung kehidupan sawah, seperti sistem pengairan. Komunitas merasa bahwa kebijakan ini memberikan beban tambahan, mengingat mereka yakin bahwa lahan sawah yang dimiliki dapat lebih menguntungkan jika digunakan untuk tujuan lain.

KOMUNITAS BURUH BATIK

A. Ekologi

Kampung Jenggot Tengah merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang tidak hanya terdiri dari rumah, tetapi juga *pranggok* dan pertokoan. *Pranggok* merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi batik yang dilakukan buruh batik yang kepemilikannya bersifat pribadi, bisa milik juragan batik dan bisa juga milik *maklon*. Itu bukan tempat kosong, di dalamnya terdapat berbagai peralatan produksi dengan total nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.



Sumber: Baron Melvill van Carnbee (1854)

Gambar 4.1 Kampung Djinggot (Lampau)



Sumber: LKKP diolah dari GEE (2023)

Gambar 4.2 Kampung Jenggot Tengah (Jenggot)

Kegiatan produksi industri batik beserta industri tekstil lain turut melatarbelakangi perubahan kondisi lingkungan di sekitar Kampung Jenggot Tengah. Sungai Setu kini tidak dapat diandalkan sebagai sumber air untuk mandi dan mencuci, karena tercampur dengan limbah industri. Bahkan limbah industri pernah mencemari sumur di Kampung Jenggot Tengah, yang kemudian diselesaikan secara cepat dan dengan cara damai antara pihak juragan batik dengan pihak terdampak.²⁰ Selain itu, kegiatan keislaman juga marak digelar di Kampung Jenggot Tengah. Sangat mudah menemui keramaian anak-anak mengaji di sore dan malam hari, serta tidak jarang juga terlihat kegiatan majelis orang dewasa.

Buruh batik merupakan sumber daya manusia yang paling mudah ditemui di Kampung Jenggot Tengah, termasuk di dalamnya kuli *keceh*, *maklon* dan buruh jahit. Masing-masing dari empat itu seringkali dibedakan kembali berdasarkan

²⁰ Wawancara dengan Fatakhun pada 26 Juli 2023.

tingkat kemahiran dan pengalaman, yang kemudian diikuti dengan perbedaan upah. Banyaknya jumlah mereka, tumbuh bersama pertumbuhan industri batik di Kota Pekalongan, khususnya ketika teknik tulis mulai bergeser ke teknik cap dan teknik sablon untuk meningkatkan skala produksi. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses ke sumber daya lain, yaitu bahan baku lilin (*gondo*) dan kain.



Sumber: National Museum van Wereldculturen

Sumber: LKKP (2023)

Gambar 4.3 Pranggok di Kota Pekalongan 1910-1930

Gambar 4.4 Pranggok di Kampung Jenggot Tengah

Seperti buruh pada umumnya, buruh batik di Kampung Jenggot Tengah tidak memiliki sarana produksi sendiri. Kegiatan produksi yang mereka lakukan harus menggunakan sarana produksi milik orang lain. Tenaga dan keterampilan adalah dua hal yang mereka andalkan. Mereka yang memiliki sarana produksi sendiri disebut dengan istilah *maklon* atau *buruh mbabar*. *Maklon* biasa mengajak buruh batik lain untuk bekerja bersama dengan besaran upah yang bergantung pada jumlah pesanan yang diterima dan harga yang disepakati.

Adapun peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut di antaranya adalah cap batik yang umumnya berbahan tembaga, kayu atau aluminium. Terdapat pula *plangkan* sablon yang dapat mencapai lebar 1,2 meter dan panjang 2,5 meter. Fungsi *plangkan* sablon adalah sebagai cetakan motif, baik yang dituangkan nantinya adalah pewarna maupun malam. Dua hal itu merupakan peralatan pokok yang didampingi meja, kompor, loyang, malam, kain, pewarna, dan beberapa penunjang lain. Selain itu, bagi mereka atau anggota keluarga yang terlibat sebagai buruh jahit, memiliki mesin jahit sebagai sarana produksi wajib. Mesin jahit tersebut umumnya adalah hasil pinjaman dari juragan batik atau juragan konveksi.

B. Mode Produksi

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh buruh batik bergantung pada ada atau tidaknya *sanggan*. Lebih spesifik buruh batik memproduksi motif batik pada kain atau pakaian dengan peralatan yang tersedia di *pranggok* dan bukan untuk stok atau dijual sendiri. Mereka ada yang mengerjakan *sanggan* langsung dari juragan batik yang memiliki *pranggok* sekaligus memasarkan, dan ada pula yang mengerjakan *sanggan* dari *maklon*. Kegiatan produksi yang dilakukan di *pranggok* pada dasarnya berbahaya bagi kesehatan karena bersentuhan langsung dengan bahan kimia, sedangkan buruh batik bekerja dengan perlengkapan keamanan dan kesehatan yang minim.

Zahrofin merupakan salah satu buruh batik di Kampung Jenggot Tengah. *Pranggok* yang ia tempati adalah milik juragan batik di Kelurahan Banyurip dengan spesialisasi batik sablon dan batik sablon malam. Keahlian utama yang dibutuhkan di sini adalah menyablon, Zahrofin memegang peran ini. Ia menjelaskan bahwa antara batik sablon dan batik sablon malam, *plangkan* yang digunakan berbeda, sebab *plangkan* yang digunakan untuk batik sablon malam harus tahan panas. Perbedaan selanjutnya adalah dalam proses, batik sablon malam memakan waktu lebih lama, karena ada proses pewarnaan menyeluruh (*nyelup*) setelah kain disablon malam, dilanjutkan merontokkan malam (*nglorod*) setelah warna kering. Adapun orang yang bertanggung jawab dalam proses ini bukan buruh sablon, tetapi *kuli keceh*.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 4.5 Buruh Batik Membuat Batik Cap



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 4.6 Kegiatan Produksi *Kuli Keceh*

Kain batik hasil produksi kemudian ada yang masuk tahap distribusi dan pemasaran, ada pula yang diproses kembali menjadi produk jadi. Umumnya proses ini melibatkan buruh jahit. Tidak jarang seorang buruh jahit adalah istri dari seorang buruh batik atau *kuli keceh*. Beberapa buruh jahit di Kampung Jenggot

Tengah memiliki mesin sendiri, tetapi tidak jarang pula yang mesin jahitnya adalah hasil pinjaman dari juragan batik pemberi *sanggan*. Sadiah merupakan salah satu di antaranya, ia paham betul jenis-jenis teknik menjahit seperti *niketi*, *nepung*, *njilid*, hingga *piding*. Bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, keterampilan dan *sanggan* seringkali diteruskan oleh keturunannya. Kegiatan produksi tersebut disepakati secara tidak tertulis oleh industri batik di Kota Pekalongan untuk berhenti di hari Kamis untuk *pocokan* dan libur di hari Jumat.

Selain juragan batik, terdapat *maklon* yang memiliki tempat dan peralatan produksi. Ia bersama beberapa buruh batik mengerjakan pesanan dari pihak luar, baik makelar batik maupun juragan batik. Keberadaan *maklon* saat ini semakin banyak, Amir merupakan salah satunya. Dirinya telah menjadi buruh batik sejak tahun 2002. Amir ingat bahwa dahulu dirinya pernah diupah 7.500 rupiah per hari.²¹ Keputusan untuk menjadi *maklon* tidak terlepas dari garapan yang sepi sebagai buruh batik. Dengan menjadi *maklon* ia dapat mencari garapan sendiri, menurunkan harga atau menurunkan minimal produksi agar orang tertarik untuk memesan. Selain menjadi *maklon*, juga terdapat buruh batik yang mulai melirik peluang sebagai kuli bangunan karena peluang dan hasilnya dinilai lebih baik.²² Contohnya adalah Fatahillah yang sudah satu bulan tidak memiliki garapan. Kedudukan *maklon* dalam analisis Bernstein (2010) paralel dengan petani menengah yang sekilas terlihat sebagai cerminan kegiatan produksi yang mandiri, tetapi pada dasarnya sama-sama kelas yang dibentuk dalam relasi sosial produksi. Artinya *maklon* terlihat sebagai produsen yang mandiri karena mencari *sanggan* hingga melakukan kegiatan produksi dengan peralatan sendiri, tetapi pada dasarnya ia merupakan kelas bentukan relasi sosial produksi dalam industri batik yang melakukan akumulasi kapital dan menampung buruh batik tanpa juragan.

C. Relasi Sosial Produksi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam sehari, upah yang diterima oleh buruh batik adalah sekitar 90.000 rupiah. Nominal tersebut biasanya diterima oleh buruh batik dengan spesialisasi menyablon atau mengecap dari juragan batik yang menggunakan skema upah harian. Selain upah harian, buruh batik tidak

²¹ Wawancara dengan Amir pada Juni 2023.

²² Wawancara dengan Fatahillah pada Juli 2023.

jarang menerima upah dengan skema produktivitas, antara per lembar atau per kodi. Misalnya untuk mengecap rok buruh batik menerima 1.000 rupiah per lembar. Adapun dalam satu hari, jumlah rok yang selesai dicap adalah 80 lembar, sehingga dalam satu hari dapat menerima 80.000 rupiah.²³

Skala usaha juragan batik di Kota Pekalongan sebagian besar tidak mencapai kriteria yang diharuskan untuk menerapkan UMK. Hal ini membuat relasi antara juragan batik atau *maklon* pemilik *pranggok* dengan buruh batik, termasuk *kuli keceh*, tidak dilindungi oleh peraturan dan kewajiban yang mengikat. Misalnya ketika *pranggok* tidak ada *sanggan* atau hujan turun, buruh batik diberi kabar untuk libur tanpa kompensasi apapun.

Meliburkan buruh batik pada dasarnya dihindari oleh juragan batik. Juragan batik lebih memilih untuk memangkas hari kerja buruh batik mereka. Misalnya dari yang semula 6 hari menjadi 3 hari, sehingga kegiatan produksi tidak benar-benar berhenti. Buruh batik tetap saja merasa tidak tenang dengan pemangkasan hari kerja tersebut. Beberapa dari mereka memilih mencari *pranggok* lain, dan tidak jarang kemudian tidak kembali ke *pranggok* lama. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan antara buruh batik dengan juragan batik dapat dengan mudah diputus, termasuk dari sisi buruh batik itu sendiri sebagai bentuk resistensi atas keadaan yang tidak pasti.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 4.7 "Bursa Kerja" Buruh Batik



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 4.8 Pranggok di Kampung Jenggot Tengah

Utang juga sering mewarnai relasi sosial produksi antara buruh batik dengan juragan batik. Biasanya skema angsuran yang diterapkan adalah dengan pemotongan upah oleh juragan batik. Terdapat beberapa kejadian terkait utang yang tidak dilunasi oleh buruh batik dengan cara kabur atau menghilang begitu

²³ Wawancara dengan Rifai pada Juli 2023.

saja. Sebagai respons, nama buruh batik tersebut tersebar di kalangan juragan batik maupun *maklon* dan menjadi catatan khusus yang memperkecil peluang buruh batik itu untuk memperoleh pekerjaan kembali.

Ketika seorang buruh batik tidak memiliki *pranggok* tetap ataupun *sanggan*, biasanya ia akan mencari informasi kebutuhan buruh batik di *pranggok* lain. Informasi tersebut dapat datang dari buruh jahit atau buruh batik yang mereka kenal. Selain itu, mereka juga memiliki cara lain untuk segera memperoleh *sanggan*, yaitu dengan mangkal di pertigaan Bendo. Tempat ini sering pula disebut dengan istilah "Bursa Kerja". Mangkal dilakukan pada pagi hari mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan di antara waktu tersebut perwakilan juragan batik hingga *maklon* akan datang mencari buruh batik atau *kuli keceh* yang cocok dengan kebutuhan dan harga. Terdapat perbedaan lokasi mangkal yang menjadi penanda, yaitu buruh batik, baik cap atau sablon, mangkal di dekat makam, sedangkan *kuli keceh* mangkal di dekat lampu lalu lintas.

Pertukaran informasi terkait *pranggok*, baik besaran upah maupun fasilitas, dalam beberapa kesempatan menjelma menjadi fenomena *bong-bongan*. *Bong-bongan* adalah tindakan memanas-manasi sesama buruh batik, baik dari *pranggok* yang sama maupun berbeda. Implikasi dari fenomena ini adalah munculnya keinginan buruh batik untuk pindah karena tertarik dengan gambaran bekerja di *pranggok* lain, bisa karena lebih santai atau upah lebih tinggi.

D. Intervensi Pembangunan

Intervensi pembangunan yang langsung mengarah pada kegiatan produksi batik berkaitan dengan riwayat kemunculan industri batik. Munasipah menuturkan bahwa sejak dahulu Kampung Jenggot Tengah dan beberapa kampung di sekitarnya terkenal dengan karakteristik santri. Kehidupan santri cenderung mengandalkan sektor industri batik sebagai sumber penghasilan, bahkan ia dan suaminya dahulu sama-sama hidup sebagai santri dan bekerja sebagai buruh batik. Pada 1960 ketika Munasipah masih anak-anak, orang tuanya aktif sebagai pengrajin batik tulis setiap hari. Satu hingga dua dekade setelahnya, beberapa orang mulai meningkatkan skala produksi dengan menggunakan teknik sablon (*printing*). Hal ini tidak terlepas dari ambisi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan

UU Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 (Hayati, 2012). Sejak saat itu, banyak pengrajin batik yang kalah bersaing mulai beralih menjadi buruh batik, termasuk mereka yang tinggal di Kampung Jenggot Tengah.

Program lain yang mengarah pada kegiatan produksi batik berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang disebut "Batik Berlian". Selama studi lapangan, tidak ditemukan buruh batik yang menerima program tersebut, bahkan belum diketahui oleh mereka. Begitu pula jenis bantuan yang terdaftar dalam DTKS, hanya ditemukan penerima BST. Rumah bercap PKH juga jarang ditemukan di lokasi studi, justru salah satu penerima PKH yang ditemukan di lapangan adalah keluarga mantan Ketua RT. Satu program yang ditemukan menguat adalah KIP yang diminati oleh komunitas buruh batik karena dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Program bedah rumah menjadi program lain yang tersampaikan dengan baik kepada keluarga buruh batik miskin di Kampung Jenggot Tengah. Mereka menjelaskan bahwa prosesnya tidak rumit dan dapat berkelanjutan, misalnya tahun ini menerima bantuan perbaikan atap, apabila lantai perlu perbaikan maka dapat dialokasikan pada tahun berikutnya.

KOMUNITAS SERABUTAN

A. Ekologi

Komunitas serabutan di Kampung Nggodang memaksimalkan sumber daya apapun yang mereka miliki sendiri atau dapat mereka akses, utamanya terkait sumber daya sosial. Relasi sosial mereka upayakan untuk dikonversi menjadi dukungan sosial dan kerjasama yang membawa keuntungan. Hal ini sejak dahulu memainkan peran penting dalam perubahan kegiatan produktif mereka.



Sumber: Topografische Inrichting (1918)

Gambar 5.1 Kampung Nggodang (Lampau)



Sumber: LKKP diolah dari GEE (2023)

Gambar 5.2 Kampung Nggodang Kauman

Pada 1945, ketika Arum masih anak-anak, masyarakat sudah menyebut tempat ini sebagai Kampung Nggodang. Ilung menambahkan bahwa nama Kampung Nggodang sering dikaitkan dengan ungkapan “*gudange wong, luru wong opo bae ono ning kene.*” Masyarakat luar mengaitkan penamaan ini dengan tersedianya berbagai latar belakang pekerjaan masyarakat di kampung ini. Selain itu, terdapat pula yang mengaitkan penamaan tersebut dengan karakteristik permukiman Kampung Nggodang yang keteraturannya tidak sebaik permukiman Kampung Kajen.



Sumber: NU Online (Sumber Asli Tidak Diketahui)

Gambar 5.3 Suasana Jl. Hayam Wuruk 1920



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 5.4 Rob Rembesan di Kampung Nggodang

Ekologi di Kampung Nggodang telah sesak dengan rumah dan memiliki beberapa permasalahan. Banjir rob rembesan adalah salah satu permasalahan ada. Terletak sekitar 3,5 km dari bibir pantai, kampung ini terdampak banjir rob akibat rembesan dari Sungai Loji. Permasalahan ini muncul sejak proyek tanggul pesisir di pantai utara Kota Pekalongan dibangun pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan perubahan pola hidup komunitas serabutan yang harus beradaptasi dengan banjir rob, termasuk dengan membangun rumah dua lantai. Selain itu, dampak banjir rob juga meningkatkan kerentanan komunitas serabutan miskin. Mereka harus siap menghadapi pengeluaran yang tidak terduga, seperti perbaikan rumah, kendaraan, atau barang-barang yang rusak akibat rob rembesan.

Komunitas serabutan di Kampung Nggodang memiliki keterbatasan kepemilikan sumber daya dan peralatan produksi. Mereka tidak memiliki lahan pribadi yang dapat diolah. Begitu pula potensi sumber daya milik umum di sekitar, tidak ada yang memungkinkan untuk diakses oleh mereka. Misalnya, benar bahwa laut terbuka bagi siapapun, tetapi komunitas serabutan di Kampung Nggodang tidak memiliki sarana produksi dan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk menjadi nelayan sopek. Dari situ dapat dipahami bahwa karakteristik komunitas serabutan adalah penempatan diri sendiri sebagai sumber daya dalam kegiatan produksi.

Heri merupakan salah seorang serabutan di Kampung Nggodang. Melalui studi lapangan, ia diketahui menjadi tukang becak mulai pagi hari di sekitar Pasar Anyar. Kemudian mulai sore hari, ia mejadi tukang bersih-bersih di warung makan. Dirinya adalah sosok pekerja keras yang dikagumi oleh tetangga, bahkan dipercaya menjadi Ketua RT. Tim kurang beruntung untuk mengenal sosoknya lebih dalam, Heri terlebih dahulu berpulang pada pekan awal tim melakukan studi lapangan.

Sumber: LKKP (2023)

Gambar 5.5 Kotak Cerita: Kegiatan Produksi Serabutan

Keterbatasan tersebut disadari oleh mereka. Beberapa di antaranya kemudian mengambil jalan alternatif di sektor informal dengan sarana produksi umum, murah dan sederhana, seperti tukang ojek, tukang becak, hingga tukang parkir. Adapun preferensi komunitas serabutan, khususnya laki-laki, di Kampung Nggodang secara berurutan adalah sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, buruh batik, dan wiraswasta. Satu yang pertama berkaitan dengan kepastian penghasilan, dua selanjutnya berkaitan dengan sarana produksi yang paling memungkinkan dan penghasilan yang jelas, serta satu yang terakhir menjadi

pilihan yang lebih menjanjikan apabila memiliki modal.²⁴ Kahfi merupakan salah satu yang menjadi wiraswasta setelah mengumpulkan beberapa uang dari hasil bekerja secara serabutan. Ia pernah berwiraswasta sebagai *reseller online* dan penjual ikan cupang.

B. Mode Produksi

Kegiatan produktif serabutan berkaitan dengan pemaksimalan sumber daya apapun yang mereka miliki sendiri atau yang dapat mereka akses, utamanya terkait sumber daya sosial. Perubahan dan dimilikinya kegiatan produktif oleh mereka, bergantung pada eksistensi relasi sosial. Ketika suatu relasi sosial yang dimiliki tertutup atau tercabut, maka hilang pula peluang mereka untuk melakukan konversi relasi sosial menjadi dukungan sosial dan kerja sama menguntungkan. Apapun yang mereka miliki, sebisa mungkin dapat menjadi sumber daya yang mampu memberikan mereka penghasilan, termasuk ponsel pintar (*smartphone*) dan sepeda motor. Selain itu, sumber daya manusia perempuan juga banyak yang terlibat kegiatan produktif seperti dengan menjadi penjual makanan hingga buruh jahit.



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 5.6 Wawancara dengan Serabutan



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 5.7 Gang Kampung Nggodang

Tidak sulit menemukan seorang serabutan di Kampung Nggodang. Ilung misalnya, hari-harinya diisi dengan mengantar anak ke sekolah dan mengantar istri ke pasar. Dirinya tidak memiliki pengalaman terkait keahlian spesifik. Sebelumnya ia mengandalkan peluang yang ada di kawasan kios semi-permanen pedagang alun-alun, sebagai apapun dirinya berkenan.²⁵ Menata tenda kios, menjaga kios, menata parkir, penitipan peralatan pedagang, hingga kebersihan menjadi

²⁴ Wawancara dengan Puji pada Juli 2023.

²⁵ Wawancara dengan Ilung pada Juli 2023.

beberapa pilihan yang tersedia. Relokasi pedagang ke Pasar Sugihwaras tidak serta-merta menyertakan peluang serupa, sehingga Ilung tercabut (*displaced*) dari sumber penghasilan yang ia andalkan selama bertahun-tahun. Beruntungnya ia memiliki sumber daya sosial yang ia manfaatkan untuk menjadi perantara penjualan, dalam kata lain bekerja sebagai makelar.

Gang menjadi ruang interaksi bagi masyarakat Kampung Nggodang sekaligus saling berbagi peluang. Udin menuturkan bahwa ketika terdapat peluang menjadi kuli bangunan, masyarakat akan cenderung mengambalnya.²⁶ Alasannya, saat ini penghasilan harian kuli bangunan sama tingginya atau bahkan lebih tinggi dari nelayan, *kiteng*, buruh tani, dan buruh batik, namun lebih dapat menerima latar belakang mereka. Selain itu, dengan mengambil peluang menjadi kuli bangunan, biasanya keterjaminan penghasilan mereka akan lebih panjang. Hal ini dikarenakan sifat proyek pembangunan yang hampir tidak mungkin selesai dalam satu hari. Adapun Udin sendiri saat tim temui menyebut dirinya adalah serabutan, dan saat itu dirinya sedang mengambil peluang sebagai buruh sablon.

Selain serabutan dalam sektor jasa, masyarakat miskin di Kampung Nggodang juga terdapat yang bekerja serabutan dalam sektor dagang. Kahfi yang baru berusia 30 tahun, sudah bergonta-ganti sumber penghasilan yang ia sebut “bisnis”. Berdagang ikan cupang adalah “bisnis” terakhir yang ia tekuni dan kembali *rungkad*. Sebelumnya, ia sempat menuai hasil dengan berdagang pakaian *online* yang ia beli secara grosir dari toko juragan batik. Seiring berjalannya waktu ia merasa berdagang pakaian *online* sudah tidak menjanjikan, karena tidak dapat bersaing dengan harga toko *online* milik juragan batik tempatnya mengambil barang.²⁷ Saat ini keluarga kecilnya mengandalkan penghasilan istri yang menjadi buruh pabrik.

Peran perempuan dalam kehidupan komunitas miskin di Kampung Nggodang layak mendapat perhatian. Mereka menjadi sosok yang mampu menjadi penyeimbang melalui kegiatan produksi yang dilakukan, dengan menjual makanan dan menjadi buruh jahit.

²⁶ Wawancara dengan Udin pada Juni 2023.

²⁷ Wawancara dengan Kahfi pada Juni 2023.

C. Relasi Sosial Produksi

Lazimnya komunitas miskin di Kampung Nggodang menjalin relasi sosial produksi dengan pihak-pihak lain di luar Kelurahan Kauman. Pengusaha keturunan Tionghoa yang tinggal di Jalan Belimbing merupakan salah satu yang sering memberi peluang kerja sebagai buruh bangunan. Informasi dari pengusaha luar kampung disebarkan secara spontan sesama komunitas serabutan di Kampung Nggodang. Sahur adalah salah satu serabutan yang sering memperoleh informasi pekerjaan sebagai buruh bangunan, termasuk dari luar Kota Pekalongan. Bahkan ia pernah berangkat untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan bersepeda dari Kampung Nggodang hingga Kelurahan Pekajangan di Kabupaten Pekalongan.



Sumber: NU Online (Sumber Asli Tidak Diketahui)

Gambar 5.8 Wawancara dengan Makelar



Sumber: LKKP (2023)

Gambar 5.9 Pengambilan Sanggan Menjahit

Banyak pertokoan di sekitar Kampung Nggodang, namun yang direkrut cenderung dari daerah yang lebih jauh. Hal ini disadari pemuda Kampung Nggodang bahwa daya tawar masyarakat Kampung Nggodang untuk memperoleh pekerjaan begitu rendah dan tidak diperhitungkan.²⁸ Mereka kemudian membentuk semacam wadah kerukunan pemuda yang disebut ARMADA, akronim dari Anak Remaja Kauman Nggodang. Berbagai kegiatan positif diinisiasi untuk kebaikan kampung, salah satunya dengan membersihkan dan mengecat gang kampung dengan harapan mengangkat kesan kumuh dan negatif, serta meningkatkan daya tawar dan kepercayaan masyarakat luar terhadap masyarakat Kampung Nggodang. Dengan demikian serabutan di Kampung Nggodang pada dasarnya sama dengan apa yang disebut Bernstein (2010) sebagai pekerja lepas. Keduanya sama-sama muncul akibat kalah dalam persaingan tenaga kerja.

²⁸ Wawancara dengan Arroqil pada Juli 2023.

Pemanfaatan sumber daya sosial yang mereka miliki salah satunya dilakukan dalam bentuk kegiatan makelar. Makelar di Kampung Nggodang tidak terbatas pada jual beli kendaraan atau tanah, tetapi juga meliputi makelar untuk pesanan produk batik. Skema yang digunakan adalah dengan mengantar pembeli ke juragan batik, tanpa macam-macam mengatur harga. Dengan dibawanya pembeli, juragan batik memberikan komisi di belakang transaksi dengan pembeli, yang bahkan tanpa sepengetahuan pembeli. Relasi sosial produksi ini merupakan salah satu bentuk ketahanan yang muncul dengan dimilikinya sumber daya sosial oleh serabutan di Kampung Nggodang.

D. Intervensi Pembangunan

PKH merupakan program yang paling banyak diterima oleh komunitas serabutan di Kampung Nggodang. Bantuan jenis ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat program KPR yang masih sulit diakses oleh serabutan. Mereka terhalang beberapa ketentuan terkait penghasilan dan utang berjalan. Padahal kebutuhan rumah bagi mereka cukup mendesak karena sebagian besar rumah terdampak rob rembesan yang rutin dialami hampir tiap bulan, terlebih ketika musim hujan. Terlebih dengan padatnya penduduk, sangat mudah menemui satu rumah yang terdiri dari dua kepala keluarga.

Permukiman yang dibayang-bayangi oleh rob rembesan Sungai Loji dapat memperburuk kemiskinan yang mereka alami. Hingga kini belum ada program yang mereka ketahui dalam rangka melindungi kampung dari banjir tahunan dan rob rembesan sungai yang dialami setiap bulan.

Pemuda di Kampung Nggodang telah mengakses program pengembangan kompetensi kerja melalui Kartu Prakerja. Beberapa dari mereka yang memanfaatkan ini adalah anak dari serabutan, dan kini menjadi tulang punggung dengan bekerja di perusahaan dengan upah di atas UMK.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil studi antropologi konstruksi sosial pada kemiskinan di Kota Pekalongan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konstruksi sosial pada kemiskinan di Kota Pekalongan yang tersaji pada bagian-bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemiskinan Komunitas Nelayan di Kampung Pegirian Kelurahan Krapyak

- a) Komunitas nelayan mengalami penurunan sumber daya laut dan peningkatan biaya produksi yang menyebabkan hasil yang diperoleh banyak terpangkas, khususnya biaya solar yang memangkas separuh penghasilan mereka.
- b) Komunitas nelayan sopek harus melakukan kegiatan produksi hingga 12 jam tiap melaut agar hasil tangkapan lebih banyak, yang kemudian dijual hanya pada satu tengkulak tanpa persaingan harga. Kegiatan produksi tidak dapat dilakukan ketika *musim ombak*.
- c) Komunitas nelayan sopek membagi rata hasil tangkapan dengan rata-rata tiap orang memperoleh 100.000 rupiah sekali melaut, sedangkan *kiteng* diupah harian 95.000 rupiah jika bekerja. Mereka merupakan komunitas miskin yang lahir karena kalah dan terdesak oleh modernisasi, persaingan kerja, dan perebutan sumber daya.
- d) Komunitas nelayan menerima program bantuan kapal, solar subsidi, penanggulangan rob limpasan, hingga PKH, namun praktiknya belum maksimal dan belum menyentuh akar persoalan.

2. Kemiskinan Komunitas Petani di Kampung Yosorejo Kelurahan Kuripan Yosorejo

- a) Komunitas petani mengolah sawah yang dilindungi luasannya, namun tidak dapat produktif sepanjang tahun karena sulitnya pemenuhan air dan mahalnya biaya produksi. Sebagian lahan kemudian diakumulasi oleh petani kaya.

- b) Komunitas buruh tani tidak menggarap sawah ketika musim *bero*, serta terdesak pilihan juragan tani untuk mempekerjakan buruh tani dari luar daerah. Adapun beberapa petani menggarap sawah pemerintah, yang modal produksinya seringkali harus sewa dan utang ke pemilik *rice mill*.
- c) Komunitas buruh tani diupah harian 100.000 jika bekerja, dengan ikatan kontrak hingga panen ataupun panggilan lepas. Petani penggarap yang utang modal produksi ke pemilik *rice mill*, menjual gabah kepadanya.
- d) Komunitas petani diberi bantuan sarana produksi yang fungsi dan/atau spesifikasinya belum sejalan dengan kebutuhan dan pemahaman.

3. Kemiskinan Komunitas Buruh Batik di Kampung Jenggot Tengah Kelurahan Jenggot

- a) Komunitas buruh batik menjadi sumber daya produksi dalam industri batik yang berawal dari terlibasnya pengrajin batik dengan adanya industrialisasi batik 1970-an. Mereka bergantung pada aktifnya *pranggok* milik juragan batik dan *maklon*.
- b) Komunitas buruh batik berpotensi mengalami masalah kesehatan karena melakukan kegiatan produksi yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia tanpa perlindungan yang memadai. Mereka tidak bekerja ketika musim hujan atau ketika tidak ada *sanggan*.
- c) Komunitas buruh batik menerima distribusi upah harian yang timpang dengan pemilik modal. Besaran upah harian adalah 90.000 untuk menyablon, 80.000 untuk *kuli keceh*, sedangkan tenaga kerja baru diupah setengahnya. Ikatan kerja lemah, buruh batik dapat diliburkan dan diputuskerjakan tiba-tiba, serta melahirkan fenomena *bong-bongan* dan mangkal di pertigaan Bendo.
- d) Komunitas buruh batik miskin menerima bantuan seperti bedah rumah, namun belum menerima program "Batik Berlian" jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal.

4. Kemiskinan Komunitas Serabutan di Kampung Nggodang Kelurahan Kauman

- a) Komunitas serabutan memanfaatkan sumber daya sosial, informasi dan apapun yang dimiliki sebagai sarana produksi.

- b) Komunitas serabutan memiliki kegiatan kerja yang tidak menentu dalam hal tempat, waktu, hasil, dan perlindungan hukum. Relasi sosial dan informasi yang dimiliki dimanfaatkan untuk memperoleh pekerjaan temporer dan menjadi makelar. Kegiatan produktif kaum perempuan menjadi sumber penghasilan yang sangat penting.
- c) Komunitas serabutan justru menjalin relasi sosial kuat dengan pihak di luar Kelurahan Kauman, yang kemudian dikonversi menjadi dukungan sosial dan kerja sama yang membawa keuntungan.
- d) Komunitas serabutan banyak menjadi penerima PKH, adapun pemuda mulai mengakses Kartu Prakerja yang membuka jalan menjadi pekerja di perusahaan dengan upah di atas UMK.

B. Rekomendasi

Berikut rekomendasi yang dapat diikuti dalam menindaklanjuti hasil studi antropologi tentang konstruksi sosial pada kemiskinan di Kota Pekalongan:

1. Perlu adanya program perlindungan sumber daya laut berupa pengurangan tekanan terhadapnya.
2. Perlu adanya pengalihan kegiatan ekonomi komunitas nelayan ke sektor pariwisata laut.
3. Perlu adanya program perlindungan lahan pertanian produktif, termasuk perlindungan pemenuhan sumber daya air dan pencegahan polusi.
4. Perlu adanya pengembangan pertanian kota yang berdaya jual tinggi, serta kombinasi pertanian kota dengan pariwisata.
5. Perlu adanya perlindungan upah kerja buruh batik melalui peraturan upah minimum sesuai skala usaha batik di Kota Pekalongan.
6. Perlu adanya pembesaran akses komunitas serabutan terhadap informasi, mengingat sumber daya yang mereka andalkan adalah informasi atau sumber daya sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernstein, Henry. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Sterling, Virginia: Kumarian Press.
- Chambers, Robert. (1995). "Poverty and livelihoods: whose reality counts?" dalam *Environment and Urbanization* Vol. 7 No. 1 hlm. 173-204.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore: Sage Publication.
- Elliot, Inger McCabe. (2004). *Batik Fabled Cloth of Java*. Singapore: Periplus Editions.
- Graburn, Nelson H.H. (2013). "Learning to consume: What is heritage and when is it traditional?" dalam *Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism*.
- Hayati, C. (2012). "Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007" dalam *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya*, Vol. 2 No. (1) hlm. 1-19.
- Kadarwati, T. (2009). Hubungan kerja antara juragan batik, mandor penggarap dan pengrajin pembatik di desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- Kriyantono, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lan, Thung J. (2019). *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan*. Jakarta: LIPI Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Morgan, David L. (1997). *Focus Group as Qualitative Research*. London: Sage.
- Narotzky, Susana. (1997). *New Directions in Economic Anthropology*. London: Pluto Press.
- Peluso, Nancy L. (1994). *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, George. (1995). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.
- Soetrisno, Loekman. (1999). *Pertanian pada Abad ke-21*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Spradley, James P. (1979). *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Standing, Guy. (2011). *The Precariat*. London: Bloomsbury Academic.
- Standing, Guy. (2014). *A Precariat Charter*. London: Bloomsbury Academic.
- Sugiyati, Bahreint T. (1997). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Winahyu, Retno dan Santiasih. (1993). "Pengembangan Desa Pantai" dalam *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wolf, Eric R. (1983). *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali.
- Yuwono, Pujo S.H. (2001). *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s*. Disertasi. University of Amsterdam.